

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konsep Tentang Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, baik suka atau tidak, hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan berkaitan dengan orang lain (Jones, 2009). Kondisi sejahtera (*well-being*) biasanya merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Menurut Midgley (2000: xi) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “*a condition or state of human well-being*”. Kondisi sejahtera terjadi ketika kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

The National Association of Social Workers (NASW) menyatakan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah suatu sistem nasional dari program-program, manfaat-manfaat dan layanan-layanan yang membantu mempertemukan kebutuhan-kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan hal fundamental bagi pemeliharaan masyarakat (*A nation's system of programs, benefits, and services that helps people meet those social, economic, educational, and health needs that are fundamental to the maintenance of society*).

Konsep kesejahteraan, sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara itu kesejahteraan dalam arti luas menurut Adi (2008 : 44) mencakup tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. Dalam perspektif ini maka kesejahteraan sosial (*welfare*) mengandung empat makna, yaitu :

- a. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya untuk merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan terpenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.
- b. Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni : jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal.

- c. Sebagai tunjangan sosial, khususnya AS, diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, pengangguran, keadaan ini dapat menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti : kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut “*social illfare*” daripada “*social welfare*”.
- d. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian) dan menyelenggarakan pelayanan sosial (pengertian kedua dan ketiga) (Suharto, 2007 : 104-105).

2.1.2 Tujuan kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial yaitu untuk dapat mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan mengurangi tekanan dan goncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial menurut Schneiderman dalam Fahrudin (2012:10) adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai kehidupan yg sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkantaraf hidup yang memuaskan.

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi masyarakat, juga memiliki fungsi-fungsi yang berkaitan erat terhadap keberfungsian sosial dalam kehidupan. Selain itu kesejahteraan sosial juga memiliki fungsi khusus yang berkaitan dengan penyesuaian sosial dan relasi sosial sehingga diharapkan peranan-peranan sosial yang terganggu dapat kembali sesuai dengan apa yang diinginkan dan keberfungsian sosial masyarakat dapat kembali normal.

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlander dan Apte, (1982) dalam Fahrudin, (2012: 12) adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Pencegahan (*preventive*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.
- b. Fungsi penyembuhan (*curative*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.
- c. Fungsi Pengembangan (*development*) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
- d. Fungsi Penunjang (*supportive*) Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Fungsi kesejahteraan sosial ini dapat di terapkan dalam praktik pekerja sosial profesional dan dalam pemecahan masalah penyandang disabilitas yang tidak dapat terlaksana kemandiriannya, upaya untuk memenuhi kemandirian penyandang disabilitas pihak lembaga yang terkait perlu untuk terlibat dalam memecahkan masalah tersebut.

2.1.4 Komponen-komponen Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting bagi yang mempelajarinya, kesejahteraan sosial

juga memiliki beberapa komponen –komponen yang tidak kalah jauh penting. Komponen-komponen tersebut menjadi suatu pembeda antara kesejahteraan sosial dengan kegiatankegiatan lainnya, Dikutip dalam Fahrudin (2012: 16) komponen-komponen dalam kesejahteraan sosial antara lain :

- a. Organisasi formal Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formal pula.
- b. Pendanaan Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat.
- c. Tuntutan kebutuhan manusia Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja, hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karenatuntutan kebutuhan manusia.
- d. Profesionalisme Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metoda dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya, Kebijakan Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan dan pengakhiran pelayanan.
- e. Peran serta masyarakat Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat. Peran serta masyarakat dalam hal ini adalah peran serta dari para penyandang disabilitas untuk dapat turut serta berpartisipasi dalam mengikuti program peningkatan kapasitas diri ini untuk meningkatkan keterampilannya.
- f. Data dan informasi kesejahteraan sosial Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

2.2 Tinjauan tentang Pekerja Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerja Sosial

Menurut International Federation of Social Worker (IFSW) (Huda, 2009:3), pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan,

memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam definisi lain pekerjaan sosial Menurut Zastrow (Suharto, 2005:24) merupakan aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif dalam mencapai tujuannya.

Pekerja sosial menurut Soetarso dalam Huraerah (2011, hlm 39) menjelaskan bahwa pekerja sosial adalah profesi yang memberikan bantuan melalui pengembangan interaksi sosial yang memiliki hubungan timbal balik satu sama lain, tujuannya supaya dapat memperbaiki kualitas kehidupan individu, kelompok maupun masyarakat dalam suatu kesatuan yang harmonis dan dapat mengembalikan keberfungsian sosial dari masing-masing individu.

Undang – undang Nomor. 11 tahun 2009 dalam Husmiati, dkk (2020, hlm 18) menyatakan bahwa pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja dengan baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial. Di tegaskan kembali dalam Undang – undang Nomor. 14 tahun 2019, bahwa praktik pekerja sosial adalah penyelenggara pertolongan profesional yang terencana, terpadu berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Menurut Max Siporin (Pujileksono dkk, 2018-12) pekerja sosial adalah praktik profesional yang dalam tindakan dan pelayanan dilakukan oleh orang yang mendapatkan pendidikan khusus dan secara formal memiliki izin dan kewenangan untuk tugasnya. Menurut Walter A. Friedlander dan Robert Z. Apte (Pujileksono

dkk, 2018:13) pekerja sosial merupakan suatu pelayanan didasarkan kepada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi manusia, sehingga dapat membantu mencapai kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan.

Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. sebagai suatu aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh tiga komponen dasar yang secara integratif membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial: (a) kerangka pengetahuan (*body of knowledge*). (b) kerangka keahlian (*body of skil*). (c) kerangka nilai (*body of values*).

2.2.2 Tujuan Pekerja Sosial

Menurut Adi Fahrudin yang mengacu pada *The Council on Social Work Education* dalam Sheafor dkk (2000) menyatakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai adalah untuk:

1. Mempromosikan, menyediakan, mempertahankan, merawat, dan menegaskan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, organisasi dan komunitas melalui (proses) bantuan dengan melaksanakan tugas-tugas, mencegah dan mengurangi penderitaan.
2. Merencanakan, melaksanakan kebijakan dan pelayanan sosial, serta menggali dan mempertemukan sumber perubahan dan melaksanakan program bantuan yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan dasar manusia.
3. Meningkatkan; kebijakan, layanan, sumber-sumber, dan pengorganisasian, advokasi administratif.
4. Mengembangkan dan menguji pengetahuan profesi, serta mengembangkan keterampilan menerapkan metode-metode dan teknik-teknik pekerjaan sosial dikaitkan dengan pencapaian tujuan-tujuannya.

2.2.3 Fungsi Pekerja Sosial

Menurut Iskandar (2013, hlm 30) fungsi dasar seorang pekerja sosial di dalam sistem kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Di dalam fungsi ini maka dapat dilakukan upaya pelayanan sosial, perencanaan kesejahteraan sosial, perbikan dan pemeliharaan penghasilan, administrasi kesejahteraan sosial dan aksi sosial.
2. Menjamin standar subsestensi kesehatan dan kesejahteraan yang memadai bagi warga, yang mencakup tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan sumber-sumber manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar individu maupun kelompok,
 - b. Mendistribusikan dan pemeratakan alokasi sumber-sumber ekonomi maupun sosial,
 - c. Melindungi individu maupun keluarga dai bahaya-bahaya kehidupan dan membantu mereka yang mengalami bencana, kecacatan, ketidakmampuan fisik maupun mental dan sebagainya.

Menurut Sugeng Pujileksono, dkk (2018, hlm 20) fungsi pekerja sosial diantaranya :

1. Mengembangkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamain terpernuhinya standard kehidupan yang layak bagi semua orang.
3. Memungkinkan seseorang berfungsi sosial secara optimal.
4. Memberikan dukungan dan meningkatkan kemampuan tatanan sosial dan struktur institusional masyarakat.
5. Membantu memfungsikan dan mengembangkan pelayanan institusi sosial.
6. Mengimplementasikan standarisasi adaptasi sosial dan perubahan yang terukur sehingga tercipta stabilitas sosial.
7. Mencegah dan mengatasi konflik sosial dan masalah sosial.
8. Mengelola dan mengendalikan penyimpangan perilaku dan disorganisasi sosial.

2.2.4 Peran Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial sebagai seorang pemberi pertolongan dalam membantu individu, keluarga maupun masyarakat dalam mengembalikan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka untuk mencapai suatu kesejahteraan sosial yang lebih baik. Kehadiran pekerjaan sosial tidak semata-mata untuk membantu masyarakat, namun juga pekerjaan sosial memiliki peranan-peranan yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Peranan pekerjaan sosial menurut Sukoco (1995: 22-27) bahwa:

a. Sebagai pemercepat perubahan (*enabler*)

Sebagai enabler, seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya.

b. Peran sebagai perantara (*broker*)

Peran sebagai perantara yaitu dengan menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini: Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat.

c. Pendidik (*educator*)

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, *community worker* diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.

d. Tenaga ahli (*expert*)

Dalam kaitannya sebagai tenaga ahli, pekerja sosial dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area (individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat).

e. Perencana sosial (*social planner*)

Seorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional dalam mengakses sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.

f. Fasilitator

Pekerja sosial sebagai fasilitator, dalam peran ini berkaitan dengan menstimulasi atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan-perubahan individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menjadi katalis untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan

waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

2.2.5 Pekerjaan Sosial

Menurut *International Federation of Social Worker* (IFSW), pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial dan intervensi yang dilakukan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya.

Pengertian lain dari pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas profesional dalam menolong individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitas masyarakat agar berfungsi sosial yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif guna terwujud suatu tujuan. Sebagai aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh *body of knowledge* (kerangka pengetahuan), *body of skills* (kerangka keahlian), dan *body of values* (kerangka nilai). Ketiga komponen tersebut dikembangkan dari beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, ekonomi, dan politik.

Pengertian di atas, tercermin bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia (*people*) dengan lingkungannya, yang mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial guna meningkatkan taraf hidup (*human wellbeing*) masyarakat. Di

sini tergambar bahwa, dalam perkembangan praktek pekerjaan sosial disiplin ilmu Psikologi dan Sosiologi memiliki peranan penting

2.2.6 Metode Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial dalam prakteknya menggunakan metode perubahan sosial yang terencana. Metode Pekerjaan Sosial adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan dilaksanakan secara sistematis digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial. Di dalam pekerjaan sosial ada beberapa metode yang digunakan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya. Menurut Adi (2005: 141) Metode yang digunakan oleh Pekerjaan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Metode pekerjaan sosial (*casework*)

Casework/Bimbingan sosial individu/perseorangan adalah suatu rangkaian pendekatan teknik pekerjaan sosial yang ditujukan untuk membantu individu yang mengalami masalah berdasarkan relasi antara pekerja sosial dengan seorang penerima pelayanan secara tatap muka.

Prinsip dasar pada bimbingan sosial perseorangan adalah:

- Penerimaan, seorang pekerja sosial harus mau menerima dan menghormati penerima pelayanan (klien) dalam setiap kondisi yang dialaminya.
- Komunikasi, antara pekerja sosial dan klien harus saling memberi dan menerima informasi.

- Individualisasi, pekerja sosial harus memahami, menerima bahwa klien sebagai pribadi yang unik, dalam arti berbeda antara individu yang satu dengan individu lainnya.
- Partisipasi, pekerja sosial harus ikut serta secara langsung dalam membantu mengatasi permasalahan klien.
- Kerahasiaan, pekerja sosial harus mampu merahasiakan informasi yang diberikan oleh klien.
- Kesadaran diri, sebagai manusia pekerja sosial menyadari akan respon klien serta motivasi dan relasi bantuan profesional.

Pekerja sosial profesional yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman menggunakan metode bimbingan sosial perorangan ini akan menghindari sejauh mungkin bias-bias subyektifitas dan interest pribadi. Beberapa peranan pekerja sosial profesional yang menerapkan bimbingan perorangan adalah:

- Broker, membantu memberikan pelayanan sosial kepada klien.
- Mediator, menghubungkan klien kepada sumber-sumber pelayanan sosial.
- Public educator, memberikan dan menyebarluaskan informasi mengenai masalah dan pelayanan sosial.
- Advocate, membela klien memperjuangkan haknya memperoleh pelayanan atau menjadi penyambung lidah klien agar lembaga respon memenuhi kebutuhan klien.
- Outreach, pekerja sosial mendatangi atau menjangkau pelayanan.

- Behavioral specialist, sebagai ahli yang dapat melakukan berbagai strategi atau teknis mengubah perilaku seseorang.
- Konsultan, memberikan nasehat kepada klien untuk memenuhi kebutuhan atau pemecahan masalah.
- Konselor, mencarikan alternatif yang dapat membantu klien dalam upaya mengatasi masalahnya.

2. Metode pekerjaan sosial (*Groupwork*)

Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. Jadi bimbingan sosial kelompok digunakan untuk membantu individu dalam mengembangkan atau menyesuaikan diri dengan kelompok/lingkungan sosialnya dengan kondisi tertentu atau membantu kelompok mencapai tujuannya. Beberapa prinsip bimbingan sosial kelompok antara lain:

- 1) Pembentukan kelompok secara terencana. Kelompok merupakan satu kesatuan dimana individu memperoleh pelayanan untuk mengembangkan pribadinya. Kelompok yang telah terbentuk, maka badan sosial yang menerima kelompok dimaksud perlu memperhatikan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan situasi kelompok, terutama yang dapat memberikan kemungkinan untuk perkembangan individu menuju ke arah positif dalam pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh kelompok.
- 2) Memiliki tujuan yang akan dicapai bersama. Di dalam bimbingan sosial kelompok tujuan, perkembangan individu dan kelompok harus

dirumuskan dengan cermat oleh pembimbing kelompok agar terdapat keserasian antara harapan dan kemampuan kelompok.

- 3) interaksi terpimpin. Dalam bimbingan sosial kelompok harus dibina hubungan yang bertujuan antara pekerja sosial dengan anggota-anggota kelompok dan atas dasar keyakinan bahwa pekerja sosial akan menerima anggota kelompok sebagaimana adanya.
- 4) Pengambilan keputusan. Kelompok harus dibantu dalam mengambil keputusan-keputusan sendiri dan menentukan kegiatan yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya.
- 5) Organisasi bersifat fleksibel dalam arti organisasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Organisasi yang formal harus fleksibel dan harus didorong bila sedang berusaha mencapai tujuan yang penting, yang dipahami oleh para anggotanya dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.
- 6) Penggalan sumber-sumber dan penyusunan program. Sumber yang ada di masyarakat harus dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman kelompok, untuk dimanfaatkan para anggota dan kelompok itu sendiri. Penilaian kegiatan secara terus-menerus terhadap proses dan hasil program atau pekerjaan kelompok yang merupakan jaminan dan pertanggungjawaban terhadap apa yang diselesaikan masing-masing pihak untuk keseluruhan.

3. Metode Pekerjaan Sosial COCD (*Community Organization/Development*)

Metode Pekerjaan Sosial COCD merupakan salah satu metode yang dilakukan oleh pekerja sosial dimana dilama prosesnya bertujuan untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan diri mereka sendiri melalui aktivitas-aktivitas atau program yang kolektif. Menurut Johnson (1984) dalam Sundayani (2015:35) *Community Work* (Pengembangan masyarakat) sebagai berikut: “*Community Work* merupakan metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses yang mempengaruhinya.” Bimbingan sosial dengan masyarakat sebagai salah satu metode pekerjaan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat serta menekankan dengan adanya prinsip peran serta atau partisipasi masyarakat. Upaya tersebut cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan bidang tertentu di masyarakat seperti kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak dan lain sebagainya. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah:

- Penyusunan program didasarkan kebutuhan nyata yang mendesak di masyarakat.
- Partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat.
- Bekerja sama dengan berbagai badan dalam rangka keberhasilan bersama dalam pelaksanaan program.
- Titik berat program adalah upaya untuk pencegahan, rehabilitasi, pemulihan, pengembangan dan dukungan.

2.2.7 Pekerja Sosial Industri

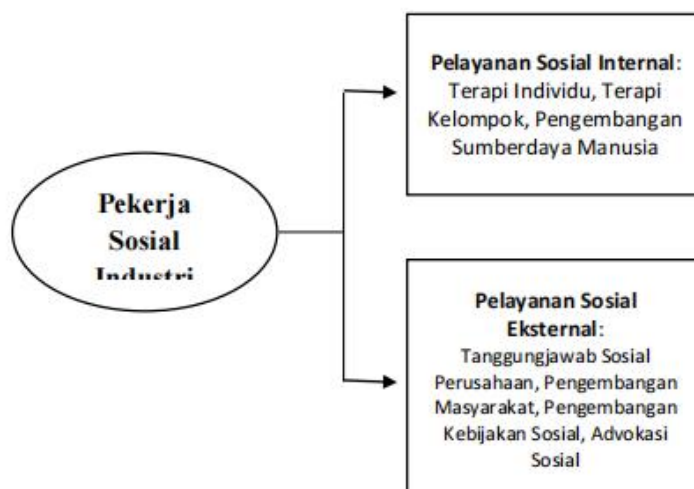
Pekerjaan Sosial Industri (PSI) dapat didefinisikan sebagai lapangan praktik Pekerjaan Sosial yang secara khusus menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metoda pertolongan yang bertujuan untuk memelihara adaptasi optimal antara individu dan lingkungannya, terutama lingkungan kerja. Dalam hal ini, PSI menangani beragam kebutuhan individu dan keluarga, relasi dalam perusahaan, serta relasi lain yang lebih luas antara tempat kerja dan masyarakat yang dikenal dengan istilah tanggungjawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). (Suharto, 2006; dalam Suharto 2009).

Pekerja Sosial sebagai agen perubahan yang bertugas mewujudkan keberfungsian sosial masyarakat agar terciptanya kesejahteraan sosial memiliki peran-peran tersendiri dalam menjalankan praktiknya. Dalam dunia industri, pekerja sosial memiliki tugas serta peranan tersendiri. Bidang tugas Pekerja Sosial yang bekerja dalam dunia industri dijelaskan oleh Johnson (1984:263-264), sebagai berikut:

1. Kebijakan, perencanaan dan administrasi. Bidang ini umumnya tidak melibatkan pelayanan sosial secara langsung. Sebagai contoh, perusahaan tidak melibatkan kebijakan untuk peningkatan karir, pengadministrasian program-program tindakan afirmatif, pengkoordinasian program-program jaminan sosial dan bantuan sosial bagi para pekerja, atau perencanaan kegiatan-kegiatan sosial dalam departemen-departemen perusahaan.

2. Praktik langsung dengan individu, keluarga dan populasi khusus. Tugas Pekerja Sosial dalam bidang ini meliputi intervensi krisis (*crisis intervention*), asesmen (penggalian) masalah-masalah personal dan pelayanan rujukan, pemberian konseling bagi pecandu alcohol dan obat-obatan terlarangm pelayanan dan perawatan sosial bagi anak-anak pekerja dalam perusahaan atau organisasi serikat kerja, dan pemberian konseling bagi pensiunan atau pekerja yang menjelang pension.
3. Praktik yang mengkombinasikan pelayanan sosial langsung dan perumusan kebijakan sosial bagi perusahaan.

Pekerja Sosial dalam menjalankan tiga bidang tugas diranah industri dapat menggunakan dua pendekatan baik mikro maupun makro. Dalam pendekatan mikro, terdapat beberapa pelayanan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi individu dalam perusahaan, seperti dengan konseling dan terapi pada individu. Untuk pendekatan makro, pelayanan yang diberikan kepada kelompok melalui terapi kelompok, serta pelatihan dan pengembangan.



Pelayanan Sosial Internal dan Eksternal Pekerja Sosial Industri (Suharto, 2009:8)

Tipologi model *setting* Pekerja Sosial Industri (Straussner, 1989:8-13, dalam Suharto, 2009:16) yang merupakan konseptualisasi tentang beragam pelayanan, juga peranan dan keterampilan yang dimiliki Pekerja Sosial Industri, diantaranya adalah:

1. Model pelayanan sosial bagi pegawai (*the employee service model*)

Model ini meliputi perancangan dan pengimplementasian program-program dan pelayanan-pelayanan sosial yang terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pegawai suatu perusahaan secara individual. Selain bermanfaat bagi pegawai yang bersangkutan. Model ini sangat bermanfaat bagi perusahaan karena dapat meningkatkan kepuasan kerja, produktivitas, dan kesetiaan pegawai terhadap perusahaannya. Berbagai program dan pelayanan langsung, umumnya diarahkan untuk membantu para pegawai dalam menghadapi gangguan fisik, mental, masalah keluarga dan masalah sosial yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan perannya sebagai pegawai. Model pelayanan sosial bagi pegawai merupakan bentuk atau tipe intervensi pekerjaan sosial yang paling umum dilakukan para pekerja di perusahaan.

2. Model pelayanan sosial bagi majikan atau organisasi perusahaan (*the employer-work organization service model*)

Dalam model ini yang menjadi klien pekerja sosial adalah pihak perusahaan, bukan individu atau kelompok pegawai. Tujuan utamanya adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan dan pelayanan-pelayanan yang

berhubungan dengan dunia kerja. Program dan pelayanan dalam konteks ini, misalnya menyangkut pendirian fasilitas penitipan anak, perawatan kesehatan, pelayanan khusus bagi pegawai wanita atau kelompok minoritas tertentu, pemberian analisis dan saran berkaitan dengan pengembangan pelatihan bagi para pelanggan sebuah bank. Sebagaimana model pertama, pekerja sosial yang menerapkan model ini bisa bekerja sebagai konsultan eksternal yang disewa perusahaan atau bisa pula menjadi bagian dari pegawai perusahaan yang bersangkutan.

3. Model pelayanan sosial bagi konsumen (*the consumer service model*)

Model ini berfokus pada kebutuhan-kebutuhan konsumen dari perusahaan. Pelayanan ini biasanya diberikan sebagai bentuk ‘pembelaan’ atas hak-hak konsumen untuk menerima pelayanan perusahaan yang berkualitas. Pelayanan juga bisa diberikan sebagai bentuk ‘terima kasih’ perusahaan kepada para pelanggannya yang telah turut membesarkan perusahaan. Beberapa peran yang sering dimainkan para pekerja sosial dalam model ini adalah konselor, perencana dan pengembang program, konsultan dan pembela.

4. Model tanggungjawab sosial perusahaan (*the corporate social responsibility model*) atau model investasi sosial perusahaan (*the corporate social investment*)

Model ini pada dasarnya menunjuk pada perluasan peran perusahaan yang tidak hanya mengurus kesejahteraan pegawai dan kebutuhan konsumen saja. Melainkan, turut pula peduli akan kehidupan masyarakat yang tinggal

diseputar perusahaan. Istilah tanggungjawab sosial perusahaan sering dikritik sebagai terlalu filantropis, yakni hanya melibatkan program-program sosial jangka pendek dan pemberian uang atau barang dari perusahaan bagi sekelompok warga masyarakat.

5. Model kebijakan public di bidang pekerjaan (*work related public policy model*).

Model ini mencakup formulasi, identifikasi, analisis, advokasi bagi kebijakan, serta program dan pelayanan-pelayanan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dunia kerja. Pekerja sosial memegang peranan cukup penting dalam model ini, yakni sebagai perencana dan pengembang kebijakan, analis kebijakan, dan advokat kebijakan. Sebagai perencana dan pengembang kebijakan, pekerja sosial merancang kebijakan sosial yang dapat diajukan kepada pemerintah dan DPR untuk disahkan dan ditindaklanjuti. Peran sebagai analis kebijakan menunjuk pada tugas-tugas pekerja sosial untuk menelaah konsekuensi-konsekuensi kebijakan sosial, baik yang akan maupun telah diterapkan pemerintah. Sedangkan sebagai advokat kebijakan, pekerja sosial menjalankan peran 'mendesakkan' kebijakan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan sasaran kebijakan (*policy audience*).

Kelima model dalam tipologi di atas terlihat bahwa peran Pekerja Sosial industri di Indonesia harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani model-model pelayanan tersebut. Tentunya perlu dibekali keterampilan serta pengetahuan yang sesuai diawali dengan melakukan Pekerja Sosial Industri

Pelayanan Sosial Internal: Terapi Individu, Terapi Kelompok, Pengembangan Sumberdaya Manusia Pelayanan Sosial Eksternal: Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Pengembangan Masyarakat, Pengembangan Kebijakan Sosial, Advokasi Sosial assesmen terhadap budaya yang ada dalam perusahaan agar nantinya memiliki gambaran intervensi seperti apa yang akan diberikan. Dan tentunya yang menjadi catatan penting adalah intervensi yang dilakukan harus secara holistik. Agar hasil dari intervensi menimbulkan perubahan yang maksimal dan berkelanjutan.

2.3 Tinjauan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR)

2.3.1 Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Nuryana (2005) secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Di Indonesia, keberadaan sudah cukup populer. Terbukti dari telah banyaknya perusahaan yang menerapkan pendekatan CSR dan memiliki program CSR dalam perusahaannya. Hubungan antara Pekerja Sosial Industri dengan CSR muncul karena yang terjadi pada masyarakat industri sehingga menimbulkan fenomena DEAF (Dehumanisasi, Equalisasi, Aquariumisasi, dan Feminisasi) yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2006). Berikut ini adalah penjabarannya:

1. Dehumanisasi Industri

Efisiensi dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik bagi kalangan

buruh di perusahaan, maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Tindakan merger dan perampangan perusahaan telah menimbulkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran. Ekspansi dan eksploitasi industri telah melahirkan ketimpangan sosial, polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat.

2. Equalisasi Hak-hak Publik

Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang seringkali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan, bukan saja dalam proses produksi, melainkan juga dalam kaitannya dengan kepedulian perusahaan terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya.

3. Aquariumisasi Dunia Industri

Dunia kerja kini semakin transparan dan terbuka laksana akuarium. Perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip etis dan filantropis tidak akan mendapat dukungan public. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan seperti ini ditutup.

4. Feminisasi Dunia Kerja

Semakin banyak wanita yang bekerja menuntut penyesuaian perusahaan, bukan saja terhadap lingkungan internal organisasi, seperti pemberian cuti hamil dan melahirkan, keselamatan dan kesehatan kerja, melainkan juga

terhadap timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan remaja, akibat berkurangnya atau kehadiran ibu-ibu di rumah dan tentunya di lingkungan masyarakat. Pelayanan sosial seperti perawatan anak (*child care*), pendirian fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak, atau pusat-pusat kegiatan olah raga dan rekreasi bagi remaja merupakan sebuah “kompensasi” sosial terhadap isu ini.

2.3.2 Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR merupakan strategi bisnis yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan. Kondisi ini berdampak pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan baik untuk *stakeholders* internal maupun eksternal. John Elkington mengembangkan konsep *Triple Bottom Line*, Elkington berpandangan bahwa jika perusahaan ingin menjaga keberlangsungan hidupnya, maka perusahaan harus memperhatikan 3P, yaitu pijakan yang seimbang pada aspek *profit* atau keuntungan, *people* atau masyarakat dan *planet* atau lingkungan, atau yang lebih dikenal dengan *Triple Bottom Line*. (Widjaja dan Pratama, 2015: 50).

- *Profit* adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksinya. Tetapi dalam *Triple Bottom Line*, perusahaan bukan hanya bertujuan mencari materi sebanyak-banyaknya sampai harus mengabaikan dampak yang terjadi akibat proses produksi yang dialami lingkungan sekitarnya.

- *People* atau masyarakat adalah salah satu pihak yang terkena imbas dari aktivitas produksi perusahaan, sehingga perusahaan seharusnya memberikan perhatian lebih kepada masyarakat, khususnya yang ada di sekitar perusahaan, yang mendapatkan dampak secara langsung dari kegiatan perusahaan, seperti polusi udara, suara, limbah dan sebagainya.
- *Planet* atau lingkungan juga menjadi sasaran dari kegiatan CSR perusahaan. Dalam triple bottom line, yang dimaksud dengan *planet* adalah sumber daya alam yang tetap terjaga kelestariannya meskipun perusahaan telah melakukan kegiatan produksinya. Perusahaan harus bertanggungjawab terhadap lingkungan, seperti air, tanah, udara untuk keberlanjutan kehidupan manusia.

Menurut Achie B. Carrol, secara konseptual, tanggungjawab sosial perusahaan didasari tiga prinsip dasar yang dikenal sebagai Triple Bottom Line. Sedangkan konsep piramida CSR memberi justifikasi teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu melaksanakan CSR untuk masyarakat di sekitarnya. Dalam pandangan Carrol, CSR adalah puncak piramida yang terkait erat dengan tanggungjawab filantropis (Suharto,2007:104-105). Dengan demikian Piramida Carrol menjelaskan pandangan masyarakat atas tanggungjawab sosial perusahaan, yang berisi :

a. *Economic Responsibility*

Economic Responsibility atau tanggungjawab ekonomi harus dilihat sebagai inti dari tanggungjawab, oleh karena itu tanggungjawab

ekonomi berada pada posisi paling bawah yang melambangkan landasan. Perolehan keuntungan dan memaksimalkan penerimaan perusahaan adalah tanggung-jawab utama. Dengan kata lain, *make a profit* adalah kata kuncinya. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup dan berkembang. Jadi dapat dikatakan bahwa tanggungjawab ekonomi adalah jika perusahaan memperoleh keuntungan sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan tanggung-jawab ekonomi dapat diartikan sebagai profit maximization jika perusahaan selalu berusaha meningkatkan kinerjanya.

b. *Legal Responsibility*

Legal responsibility atau tanggungjawab hukum diartikan sebagai *obey the law*, perusahaan harus taat hukum. Bisnis harus menaati hukum (peraturan) yang berlaku. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang taat pada hukum disertai dengan etika. Dengan demikian, hukum dan etika saling melengkapi, karena dari segi normatif, etika mendahului hukum. Sehingga sering terdengar bahwa perusahaan sudah berlaku etis bila telah menaati hukum. Perusahaan dikatakan sudah memenuhi kewajiban tanggungjawab hukum bila telah bertindak legal dan mematuhi peraturan yang berlaku.

c. *Ethical Responsibility*

Ethical responsibility atau tanggungjawab etis berarti perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar,

adil dan fair. Norma-norma masyarakat menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Termasuk dalam tanggungjawab etis adalah kepekaan korporat dalam menjunjung kearifan dan adat lokal. Pengenalan terhadap kebiasaan, opinion leader, kebudayaan, bahasa daerah, kepercayaan dan tradisi.

d. *Philanthropic Responsibility*

Philanthropic responsibility atau tanggungjawab filantropis adalah tuntutan kepada perusahaan agar memberikan kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, artinya perusahaan harus *be a good citizen*, menjadi warga negara yang terbaik, bahwa perusahaan memang harus memperoleh laba, mematuhi hukum dan berperilaku baik, benar dan adil, tetapi juga harus berpartisipasi aktif membantu masyarakat secara langsung baik berupa materi maupun non materi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup semua pihak, sehingga diharapkan mempersempit jurang si kaya dan si miskin dengan hasil akhir kemandirian masyarakat. Para pemilik dan pegawai memiliki tanggungjawab ganda yaitu kepada perusahaan dan kepada publik.

2.3.3 Model Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Saidi & Abidin (2004) : ada 4 model pola CSR di Indonesia yaitu:

1. Keterlibatan langsung, Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju.
3. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi pemerintah (Omop), Instansi Pemerintah, Universitas atau media masa, baik dengan mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam konsorsium, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.

2.3.4 Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Branco dan Rodrigues dalam Mursitama dkk (Hi. Saleh 2018), membagi dua manfaat CSR bila dikaitkan dengan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dari sebuah perusahaan, yaitu dari sisi internal maupun eksternal.

- a. Manfaat Internal CSR, yaitu :
 1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan mengadakan kegiatan pengembangan ketrampilan yang dimiliki pegawai, yang berdampak pada efektifitas sistem manajemen sumber daya manusia. Kegiatan ini dapat menaikkan kesetiaan dan dukungan dari pegawai

2. Perusahaan lebih peduli terhadap lingkungan dengan melakukan tindakan meminimalisir bahkan meniadakan pencemaran sebagai hasil olahan produksi perusahaan, dan hal ini berdampak pada relasi yang baik dengan supplier.
 3. Mewujudkan budaya organisasi, kapabilitas sumber daya manusia, dan organisasi yang baik. Perusahaan dapat mengenalkan CSR dan mempunyai keinginan untuk belajar. Terdapat koordinasi antar fungsi didalam perusahaan, disamping itu ada peningkatan peran serta pegawai di internal perusahaan dan kemampuan pegawai.
 4. Pelaksanaan CSR menyebabkan kinerja keuangan menjadi lebih baik dan menaikkan kepemilikan modal.
- b. Manfaat Eksternal CSR, yaitu :
1. Implementasi CSR akan menaikkan citra perusahaan sebagai lembaga yang menumbuhkan tanggungjawab sosial, hal ini berkaitan dengan *service of excelent* yang diberikan kepada *stakeholders* eksternal
 2. CSR adalah produk pembeda yang sangat disarankan kepada perusahaan, hal ini berarti produk ini termasuk dalam kategori ramah lingkungan dan hasil dari perusahaan yang telah melaksanakan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan melakukan CSR sesuai dengan kekhasan dari perusahaan tersebut.

3. Pelaksanaan CSR adalah indikator komunikasi yang baik antara perusahaan dengan khalayak. Pada akhirnya, semua pihak mendukung mewujudkan citra dan nama baik perusahaan, dan menunjang hubungan baik antara perusahaan dan karyawan dengan komunitas menjadi lebih terikat dan menyatu.
4. Sumbangan CSR terhadap kinerja perusahaan dapat berupa kesempatan sebagai penghargaan terhadap perilaku yang baik dari perusahaan dan kapasitas perusahaan dalam melindungi dirinya dari dampak yang tidak baik dari perilaku yang buruk.

2.3.5 Peran Pekerja Sosial dalam Implementasi Program CSR

Pekerja sosial industri bekerja pada setting industri atau perusahaan dimana pekerja sosial menangani masalah seperti *burnout*, relasi karyawan satu sama lain, relasi karyawan dengan majikan atau yang lebih luas lagi yaitu relasi perusahaan dengan masyarakat disekitar dan pemangku kepentingan lainnya atau yang lebih dikenal dengan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurut Davis dan Frederick dalam Wahyudi (2011: 35) bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah:

Kewajiban organisasi bisnis atau perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan disamping kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri.

Pengertian CSR tersebut mengemukakan bahwa perusahaan selain berusaha meningkatkan keuntungan perusahaan, perusahaan juga dituntut untuk memperhatikan aspek diluar perusahaan yang disebabkan oleh aktivitas

perusahaan serta terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari pengertian tersebut terdapat penekanan bahwa perusahaan harus turut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimana kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu fokus dan tujuan dari pekerjaan sosial.

Tanggung jawab sosial perusahaan dan pekerja sosial didalamnya terdapat aspek atau metode pengembangan masyarakat (*community development*) yang sekarang diterapkan oleh perusahaan dengan istilah ComDev. Tujuan dari ComDev yaitu bukan sekedar membantu atau memberi barang kepada para penerima bantuan. Melainkan berusaha agar para penerima memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mampu menolong dirinya sendiri. Dengan kata lain ComDev berusaha untuk memberdayakan masyarakat.

Program-program pelatihan, pemberian modal, perluasan akses terhadap pelayanan sosial, dan peningkatan kemandirian, proses pemberdayaan diarahkan agar kelompok lemah tersebut memiliki kemampuan atau keberdayaan.

Menurut Suharto (2007: 110) keberdayaan disini bukan saja dalam arti fisik dan ekonomi, melainkan pula dalam arti psikologis dan sosial seperti berikut:

1. Memiliki sumber pendapatan yang dapat menopang kebutuhan diri dan keluarganya.
2. Mampu mengemukakan gagasan didalam keluarga maupun didepan umum.
3. Memiliki mobilitas yang cukup luas.
4. Beradaptasi dalam kehidupan sosial.
5. Mampu membuat dan menentukan pilihan-pilihan hidupnya.

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari menentukan populasi atau kelompok sasaran, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kelompok sasaran, merancang program kegiatan dan

cara-cara pelaksanaannya, pendanaannya, mengimplementasikan kegiatan, hingga memonitor dan mengevaluasi kegiatan. Penjelasan pemberdayaan dilakukan perusahaan melalui kegiatan CSR dalam program kemitraan dengan memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat. Disinilah pekerja sosial dibutuhkan oleh perusahaan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat dan lain-lain agar kegiatan CSR perusahaan dapat berjalan sesuai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Tinjauan tentang Pengembangan Masyarakat

2.4.1 Pengertian Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan sebuah istilah yang terdiri dari dua konsep, yaitu pengembangan dan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Rothman (1995), bahwa pengembangan lebih merujuk pada upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar kondisi sosial-ekonomi meningkat. Pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui bentuk kegiatan/ usaha bersama dan terencana guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan manusia. Sedangkan komunitas atau masyarakat merupakan konsep yang menyatakan tentang sekelompok orang dengan identitas bersama yang diatur dalam sebuah kesatuan sistem sosial yang berlaku di dalamnya (Raharjo, 2015).

Pembangunan masyarakat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, di mana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama (Raharjo, 2006). Menurut Zamhariri (Graha, 2009), pembangunan masyarakat adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi

masyarakat. Sehingga dengan demikian, pengembangan masyarakat sangat bergantung pada pola hubungan dan interaksi antara individu-individu di dalam sebuah komunitas/ masyarakat serta adanya aksi bersama daripada kegiatan individu-individu terhadap perubahan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka (FCDL, 2003:1).

2.4.2 Ciri-ciri Pengembangan Masyarakat

Ciri-ciri pengembangan masyarakat menurut Gito Saputro dan Rangga (2015: 9) yaitu :

1. Memiliki tujuan yang ingin dicapai.
2. Memiliki wadah yang terorganisir.
3. Kegiatan yang dilakukan terencana, berlanjut, dan sesuai dengan kebutuhan serta ketersediaan sumber daya setempat.
4. Ada tindakan bersama dan keterpaduan dari berbagai aspek yang terkait.
5. Ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap-tahap pengembangan.

2.4.3 Model Pengembangan Masyarakat

Jack Rothman mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi tentang pengembangan masyarakat yaitu:

1. Pengembangan masyarakat lokal (*Locality Development*)

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

2. Perencanaan sosial (*Social Planning*)

Perencanaan sosial dimaksudkan untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk (rendahnya usia harapan hidup, tingginya tingkat kematian bayi, kekurangan gizi) .

3. Aksi sosial (*Social Action*)

Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*), sumber (*distribution of resources*) dan pengambilan keputusan (*distribution of decision making*). Pendekatan ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi korban ketidakadilan struktur. Mereka miskin sebab dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan, oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Aksi sosial

berorientasi pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk merubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*).

Model pengembangan masyarakat juga diterapkan dalam ruang organisasi kemasyarakatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dalam kegiatan pengembangan masyarakat LSM menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu:

a. The Welfare Approach

Pendekatan ini dilakukan dengan memberi bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu contohnya kepada mereka yang terkena musibah. Pendekatan ini kebanyakan dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan berupa pelayanan kesehatan, penyediaan makanan dan penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

b. The Development Approach

Pendekatan yang dilakukan dengan cara memusatkan kegiatannya pada pengembangan proyek pembangunan dengan tujuan meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Pendekatan ini dijalankan melalui program pendidikan dan latihan bagi tenaga NGOs dan pemerintah yang berkecimpung pada bidang pengembangan masyarakat.

c. The Empowerment Approach

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Pendekatan empowerment approach bertujuan untuk memperkuat posisi tawar masyarakat lapis bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan pada setiap bidang dan sektor kehidupan. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melindungi dan membela pihak yang lemah.

2.4.4 Tujuan Pengembangan Masyarakat

Tujuan umum pengembangan masyarakat dapat menentukan proses dan orientasi pengambilan keputusan keberlanjutan kegiatan pengembangan masyarakat. Beberapa tujuan umum dari pengembangan masyarakat yaitu:

- a. Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural, kemiskinan absolut.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih berkeadilan.
- c. Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang lemah dan tak berdaya
- d. Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata
- e. Meningkatkan kesempatan wajib belajar sembilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di desa maupun kota
- f. Melepaskan masyarakat dari belenggu ketunaan, keterbelakangan, ketertinggalan, ketidakberayaan, keterisoliran, ketergantungan dan kemerosotan moral.

- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan.
- h. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- i. Meningkatkan kemauan dan kemampuan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha produktif kreatif berbasis sumber daya lokal.
- j. Mengurangi dan menghilangkan berbagai bentuk kecemasan sekaligus kekhawatiran warga yang rentan terkena ancaman kerawanan pangan dan kegagalan panen.
- k. Memperkuat daya saing masyarakat di pasar lokal, regional, nasional bahkan internasional yang kompetitif.
- l. Mengurangi angka pengangguran
- m. Meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi warga *grass roots*.
- n. Meningkatkan jaminan sosial bagi warga miskin dan korban bencana alam.
- o. Meningkatkan peluang kerja produktif berbasis ekonomi kerakyatan.
- p. Mengembangkan fungsi kelembagaan lokal untuk pemberdayaan warga *grass roots*.
- q. Membangun masyarakat kreatif dan komunikatif dalam mengakses ragam informasi pembangunan inovatif.